

PERANG PEREBUTAN IRIAN BARAT: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS

THE WAR FOR WESTERN IRIAN: A HISTORICAL OVERVIEW

Doly Andhika Putra¹, Ghazalie

¹Corresponding author, Email: doly17andhika@gmail.com

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, FVFJ+G4H, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kabupaten Bogor, 16810, Indonesia

Paper received: 25-09-2023; revised: 20-10-2023; accepted: 23-11-2023; published: 30-04-2024

How to cite (APA Style): Putra, D. A., & Ghazalie, G. (2024). Perang perebutan Irian Barat: Sebuah tinjauan historis. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 7(1), 1-8. DOI: 10.17977/um022v7i1p66-76

Abstract

This paper aims to provide a comprehensive understanding of the political, military, and diplomatic dynamics surrounding the struggle of West Irian, with a specific focus on its integration into the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The research details the agreements between Indonesia and the Netherlands concerning West Irian, observing not only the international diplomatic aspects of that era but also initiating discussions on the contemporary relevance of this issue. This study employs a critical historical method in the process of data collection. The heuristic stages involve discovering and collecting various information sources related to the research theme. The study's findings indicate that the combination of local resistance, diplomacy, and the spirit of Indonesian nationalism effectively ended Dutch domination and integrated West Irian into the archipelago. This highlights the importance of sovereignty and territorial integrity for a nation.

Keywords: power struggle; integration; resistance; diplomacy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika politik, militer, dan diplomatik yang melingkupi perebutan Irian Barat, dengan fokus khusus pada integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini merinci perjanjian-perjanjian antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat, dengan mengamati tidak hanya aspek-aspek diplomatik internasional pada masa itu, tetapi juga menginisiasi diskusi mengenai relevansi kontemporer dari masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis dalam proses pengumpulan data. Tahapan heuristik melibatkan penemuan dan pengumpulan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara perlawanan lokal, diplomasi, dan semangat nasionalisme Indonesia secara efektif mengakhiri dominasi Belanda dan mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayah nusantara. Hal ini menyoroti pentingnya kedaulatan dan integritas teritorial bagi sebuah negara.

Kata kunci: perebutan kekuasaan; integrasi; perlawanan; diplomasi

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandai berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat dari merdeka atas wilayah dan pemerintahannya sendiri. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah Irian Barat selama 18 tahun masih tetap dikuasai oleh Belanda, bahkan pihak Belanda berusaha untuk tetap memisahkan

Irian Barat dari NKRI. Lahirnya permasalahan Irian Barat sebenarnya didasari oleh keinginan Belanda, untuk memiliki satu propinsi yang tetap dikuasai meskipun telah menyerahkan kemerdekaannya kepada Indonesia.

Irian Barat, yang kini dikenal sebagai Papua atau Papua Barat, memegang peranan penting dalam geopolitik regional dan internasional, tidak hanya karena posisinya yang strategis dan kekayaan sumber daya alamnya, tapi juga karena sejarah penentuan nasibnya yang penuh kontroversi. Berlokasi di ujung timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Papua berfungsi sebagai pintu gerbang antara wilayah Pasifik dan Asia Tenggara, memberikan keunggulan posisi bagi Indonesia dalam aspek militer dan keamanan untuk mengawasi kawasan tersebut. Namun, di balik dominasinya di peta, Papua menyimpan rentetan narasi sejarah yang kompleks dan emosional bagi Indonesia. Sebelum era kolonial Eropa, Papua telah menjalin interaksi dengan berbagai kerajaan di Nusantara, terutama dalam bidang perdagangan dan ekspansi wilayah.

Walaupun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, isu Irian Barat terus menjadi titik perbedaan yang tajam antara Indonesia dan Belanda. Upaya Belanda untuk merebut kembali kontrol atas Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan menjadi awal dari perjuangan panjang atas Irian Barat. Belanda yang tidak langsung menerima realitas kemerdekaan Indonesia berusaha keras untuk memulihkan dominasinya di Nusantara, dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menolak pengakuan atas kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Ketika akhirnya Belanda memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, ada klausul dan kondisi tertentu yang ditanamkan dalam perjanjian. Irian Barat, wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, dengan sengaja tidak dimasukkan dalam kesepakatan kedaulatan yang ditawarkan oleh Belanda. Perjanjian Linggarjati yang disepakati pada 1947 memang memberi Indonesia hak atas banyak wilayahnya, namun dengan cerdas, Belanda memastikan Irian Barat tetap berada di bawah kendalinya. Ini menciptakan ketegangan dan menjadi titik kontroversi dalam hubungan antara kedua negara untuk tahun-tahun berikutnya.

Perebutan Irian Barat oleh Indonesia bukan hanya didorong oleh kekayaan sumber daya alam atau letak geografisnya, melainkan didasari oleh keyakinan mendalam bahwa wilayah tersebut adalah bagian esensial dari warisan budaya dan sejarah Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, Irian Barat telah menjadi bagian dari peta Nusantara kuno dan memiliki hubungan historis dengan beberapa kerajaan besar di Indonesia. Perjuangan mengembalikan kedaulatan atas Irian Barat bukanlah hal yang mudah; ini adalah misi yang panjang dan berat, melibatkan berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah. Semangat ini didorong oleh nilai-nilai yang tertanam dalam UUD 1945, yang menegaskan hak setiap bangsa untuk merdeka dan menentang penjajahan. Indonesia merasa Irian Barat telah dimanfaatkan oleh Belanda sebagai wilayah jajahannya, terutama ketika Belanda melanggar komitmen dalam perjanjian KMB yang seharusnya menyelesaikan masalah Irian Barat pada tahun 1950. Sebagai hasilnya, pembebasan Irian Barat dianggap sebagai langkah penyelesaian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Upaya integrasi Irian Barat ke dalam NKRI dihadapkan pada berbagai tantangan monumental. Mulai dari perlawanan militer dengan Belanda, tekanan diplomasi internasional, hingga tantangan dalam menyesuaikan dan mengintegrasikan masyarakat Irian Barat dengan masyarakat Indonesia lainnya. Proses integrasi ini mencapai titik klimaks dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, yang hingga kini masih menjadi subyek kontroversi dan debat. Penting juga untuk disebutkan bahwa Papua memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa dengan ratusan suku dan bahasa. Keanekaragaman ini menjadikannya sebagai wilayah yang penting dalam konteks pelestarian budaya dan warisan dunia. Namun, tantangan dalam mengintegrasikan keanekaragaman ini dengan pembangunan nasional Indonesia seringkali menimbulkan isu hak asasi manusia dan ketidaksetaraan yang mendapatkan perhatian dari komunitas internasional.

Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sejarah politik, militer, dan diplomasi seputar perjuangan Irian Barat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek sosial. Dengan merinci perjanjian-perjanjian antara Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat, penelitian ini tidak hanya menyumbangkan pemahaman lebih lanjut tentang diplomasi internasional pada era tersebut, tetapi juga membuka diskusi tentang relevansi kontemporer dari permasalahan tersebut. Analisis mendalam terhadap identitas budaya Papua sebagai bagian dari warisan nasional Indonesia memberikan perspektif baru tentang pentingnya keberagaman budaya dalam konteks pelestarian warisan dunia. Lebih jauh lagi, penelitian ini mengeksplorasi dampak integrasi Irian Barat ke dalam NKRI terhadap hak asasi manusia dan ketidaksetaraan, memberikan kontribusi berharga dalam memahami tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dengan merinci dampak internasional dan mengevaluasi relevansi kontemporer, penelitian ini menjadi sebuah sumbangan penting yang tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah, tetapi juga membuka jalan untuk merenungkan solusi yang lebih baik terkait tantangan-tantangan yang masih dihadapi hingga saat ini.

METODE

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menerapkan metode historis kritis dengan melakukan tahap heuristik yang melibatkan penemuan dan pengumpulan berbagai sumber informasi terkait tema penelitian. Sumber informasi ini mencakup dokumen primer dan sekunder yang dipilih dengan cermat untuk memastikan keabsahan dan relevansinya terhadap peristiwa masa lalu yang diteliti. Penggunaan kritik interen dan eksteren menjadi landasan untuk mengevaluasi setiap sumber informasi, memastikan bahwa data yang diperoleh tidak terdistorsi atau dimanipulasi. Proses analisis data mencakup identifikasi hubungan antar-sumber, memastikan integritas dan konsistensi informasi. Selanjutnya, pada tahap interpretasi, makna dari setiap fakta sejarah didefinisikan dan keterkaitannya dianalisis untuk membentuk gambaran holistik tentang peristiwa yang diteliti. Setelah data diverifikasi dan diinterpretasikan, tahap historiografi dimulai, di mana semua informasi disintesis menjadi karya tulis ilmiah yang menyajikan pandangan komprehensif dan terstruktur tentang peristiwa masa lalu. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengedepankan akurasi dan keabsahan data, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap sejarah yang dikaji.

Proses ini terdiri dari empat tahapan esensial, dimulai dengan tahap heuristik. Pada tahap ini, pekerjaan utama adalah menemukan dan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber informasi ini dapat berasal dari dokumen primer dan sekunder. Selanjutnya, dengan bantuan kritik interen dan eksteren, setiap sumber informasi dievaluasi untuk menentukan keabsahan dan relevansinya terhadap tema penelitian. Kajian kritis ini memastikan bahwa data yang diambil dari arsip-arsip tertentu sesuai dengan topik yang diteliti dan tidak mengandung distorsi atau manipulasi. Selain itu, hubungan antara sumber-sumber tersebut juga dianalisis untuk menjamin integritas data. Setelah itu, tahap interpretasi dijalankan. Pada tahap ini, makna dari setiap fakta sejarah didefinisikan dan hubungan antar fakta dianalisis untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang peristiwa yang diteliti. Akhirnya, dengan semua data yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan, tahapan historiografi dimulai. Di sini, semua informasi disintesis menjadi sebuah karya tulis ilmiah, memberikan pandangan holistik tentang peristiwa-peristiwa sejarah dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur (Kuntowidjoyo, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Kolonial di Irian Barat

Di ujung timur kepulauan Nusantara, terbentang wilayah yang kini dikenal sebagai Papua, atau dahulu dikenal sebagai Irian Barat. Wilayah ini memiliki kekhasan baik dari segi budaya, geografi, maupun sejarahnya, khususnya dalam konteks penjajahan oleh Belanda. Dalam konteks sejarah kolonialisasi di Indonesia, konflik mengenai Irian Barat antara Indonesia dan Belanda merupakan refleksi dari dinamika penjajahan yang berlarut-larut di wilayah timur jauh negeri ini. Memiliki luasan yang ekstensif, yakni setara dengan tiga kali ukuran Pulau Jawa atau duabelas kali lipat wilayah Belanda, Irian Barat menarik perhatian banyak negara Eropa pasca-era eksplorasi pada abad ke-16. Meskipun berbagai kekuatan Eropa berlomba untuk menguasai wilayah ini, akhirnya Belanda yang berhasil mempertahankan dominasinya di Irian Barat hingga pertengahan abad ke-20. Namun, pada tahun 1963, momentum perubahan datang ketika Indonesia berhasil membebaskan wilayah tersebut dari cengkeraman kolonial Belanda.

Dalam sejarah eksplorasi dan penjajahan Papua oleh bangsa Eropa, beberapa peristiwa penting menandai awal kedatangan mereka ke wilayah tersebut. Pada 1526-1527, dua pelaut Spanyol, Antonio d'Abreu dan Francesco Serrao, menjadi orang Eropa pertama yang tiba di Papua. Namun, informasi pertama kali mengenai Papua dan penduduknya secara rinci dicatat oleh Pigafetta, seorang pelaut dari Portugal. Saat berkunjung ke Maluku, Pigafetta memberi catatan mengenai Papua yang kemudian membuat nama "Papua" dikenal di kalangan bangsa Eropa. Pada tahun 1545, Ynigo Ortiz De Retez, seorang penjelajah Spanyol, memberi label pada wilayah tersebut sebagai "Nueva Guinea". Penamaan ini didasari oleh pengamatan De Retez mengenai kemiripan antara penduduk asli Papua dengan mereka yang tinggal di Guinea, sebuah wilayah di pantai barat benua Afrika.

Pada abad ke-16 dan ke-17, Eropa sedang berada dalam periode eksplorasi maritim. Belanda, sebagai salah satu kekuatan maritim utama saat itu, mulai menjelajahi dan mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai belahan dunia, termasuk di Nusantara. Namun, fokus awal mereka lebih kepada wilayah pusat Nusantara seperti Maluku, Jawa, dan Sumatera karena kekayaan rempah-rempahnya. Seiring dengan berjalannya waktu, pada abad ke-19, Belanda mulai menaruh perhatian pada Irian Barat. Keunikan geografi dan potensi sumber daya alam di Irian Barat menarik perhatian pemerintah kolonial. Pada tahun 1828, Belanda secara resmi mengklaim wilayah pesisir barat Papua sebagai bagian dari koloninya dan menamakannya Nieuw Guinea. Meski ekspedisi pertama mereka ke Papua tercatat pada tahun 1705, jejak nyata dan dominasi Belanda di wilayah ini baru benar-benar mendalam sekitar tahun 1828. Pada tahun tersebut, sebagai simbol dominasinya, Belanda mendirikan sebuah benteng bernama Fort Du Bus di Lobo, Teluk Triton, sebuah wilayah yang sekarang masuk dalam Kabupaten Kaimana.

Dekade berikutnya menunjukkan upaya sistematis Belanda dalam memperkuat pengaruhnya di Papua. Tahun 1898 menjadi momen penting ketika Parlemen Belanda mengesahkan anggaran khusus untuk mendirikan struktur pemerintahan di Papua Barat. Dengan demikian, Papua resmi berada di bawah kendali Belanda, yang berlanjut hingga tahun 1962. Dalam usahanya untuk mengatur dan mengendalikan wilayah yang luas ini, Belanda membagi Papua menjadi dua wilayah administratif: Bagian Utara, yang dikenal sebagai afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan pusat pemerintahannya di Manokwari, Teluk Doreri, dan Bagian Selatan atau afdeeling West-ed Zuid Nieuw Guinea yang berpusat di Fakfak. Tiap wilayah ini dikelola oleh seorang kontroleur yang berada di bawah otoritas keresidenan Maluku.

Selain upaya administratif, pendekatan sosial-kultural juga diterapkan oleh Belanda di Papua. Mereka mengandalkan bantuan misionaris Kristen, khususnya golongan Protestan dan Katolik, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat lokal. Pada tahun 1855, misionaris Kristen Protestan, yang dipimpin oleh Otto dan Geisler dari Jerman, memulai misinya di bagian Utara Papua. Di sisi lain, misionaris Katolik yang dipimpin oleh Pater J. Vertenten memulai misinya di

bagian Selatan Papua pada tahun 1896. Selain menyebarkan ajaran agama, kedua kelompok misionaris ini aktif dalam bidang pendidikan dan infrastruktur masyarakat, dengan menghadirkan guru-guru dari Minahasa dan Ambon. Namun, dalam hal pembangunan infrastruktur, fokus utama pemerintah Belanda adalah mendirikan pos-pos pemerintahan sebagai simbol dominasi dan kendali atas wilayah. Strategi kolonial Belanda di Papua pada dasarnya didorong oleh kebutuhan untuk melawan penetrasi Inggris dan Jerman, yang saat itu telah menguasai Papua bagian timur (sekarang dikenal sebagai Papua Nugini). Kekuatan-kekuatan kolonial Eropa ini saling bersaing untuk menguasai wilayah-wilayah strategis di Nieuw Guinea. Untuk Belanda, Papua tidak hanya memiliki nilai strategis, tetapi juga sebagai perlindungan untuk kepentingan perdagangan mereka di kawasan Nusantara dan untuk melindungi koloninya dari intervensi kekuatan Eropa lainnya (Ricklefs, 1993).

Wilayah Papua, dengan keberagaman geografisnya yang luas dan masyarakat adatnya yang masih mengikuti cara hidup tradisional, memberikan tantangan tersendiri bagi Belanda dalam menjalankan kebijakan kolonialisasinya. Mengingat luasnya wilayah dan kesulitan mengendalikan seluruh aspek masyarakat, Belanda memilih pendekatan praktis dengan hanya mendirikan pos-pos pemerintahan sebagai simbol klaim kekuasaannya atas Papua Barat. Sebagai upaya untuk memajukan ekonomi wilayah Papua, Belanda mengambil langkah strategis dengan mengembangkan wilayah Digul dan Merauke sebagai residen baru. Ironisnya, meskipun wilayah ini dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi, Boven Digoel di wilayah Digul malah lebih dikenal sebagai tempat pengasingan bagi para pemimpin dan pemberontak nasionalis dari Pulau Jawa, seperti Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan Soekarno. Struktur administratif wilayah Zuid Nieuw Guinea pun mengalami perubahan. Statusnya sebagai afdeeling dicabut dan bergabung dengan onderafdeeling yang dikelola oleh seorang kontroleur. Di bawah struktur ini, Boven Digoel memiliki satu besturessort (desa), sementara Merauke memiliki empat.

Pembukaan wilayah pedalaman Papua oleh Belanda terjadi relatif lambat. Pada tahun-tahun menjelang 1936-1938, wilayah tersebut mulai diakses, terutama oleh para misionaris. Sebagai contoh, Paniai berhasil diakses oleh Letnan Wissel pada tahun 1936. Tak lama setelah itu, lembaga pendidikan dibuka oleh para misionaris di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah Amungme baru dibuka pada tahun 1954. Dalam strategi pemerintahannya, Belanda menerapkan sistem yang mengakui keberadaan struktur pemerintahan adat lokal. Namun, struktur ini tunduk pada kebijakan dan arahan dari Kerajaan Belanda. Sistem ini dikenal sebagai Zelf bestuurend landschappen. Dengan demikian, walaupun ada otonomi lokal, pemerintahan adat tetap berada di bawah pengawasan Belanda, yang pada akhirnya dikoordinasikan melalui keresidenan di Maluku dan Kerajaan Tidore. Namun, ketika Jepang mulai memasuki wilayah Papua, kebijakan Belanda mengalami perubahan drastis. Jepang, dengan tujuan utamanya sebagai kekuatan militer, menjadikan Papua sebagai basis militer dalam konflik mereka di Pasifik melawan Sekutu. Evolusi kebijakan kolonial Belanda di Papua, khususnya dalam pendirian pos-pos pemerintahan, mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan adanya tekanan kompetisi kolonial dari Jerman dan Inggris di Papua bagian timur, Belanda merasa perlu memperkuat kehadirannya dengan mendirikan pos pemerintahan di Manokwari dan Fakfak pada tahun 1898 dan di Merauke pada tahun 1905. Ini semua dilakukan untuk memastikan dominasi dan klaim Belanda atas wilayah tersebut.

Sejak awal, masyarakat lokal di Irian Barat menunjukkan resistensi terhadap kehadiran Belanda. Banyak komunitas lokal yang berusaha mempertahankan tanah dan kebudayaan mereka dari intervensi asing. Pemberontakan dan perlawanan sporadis terjadi di berbagai bagian Irian Barat sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada pertengahan abad ke-20, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945, permasalahan Irian Barat menjadi isu penting dalam hubungan diplomatik kedua negara. Indonesia menganggap Irian Barat sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, sedangkan Belanda memandangnya sebagai wilayah yang terpisah dari Hindia Belanda. Perjuangan diplomasi dan

militer berlarut-larut hingga akhirnya pada tahun 1962, melalui Perjanjian New York, Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia. Ini tidak berarti bahwa perjuangan di Irian Barat berakhir. Masih banyak tantangan yang dihadapi, namun setidaknya dari sisi penjajahan, Irian Barat telah bebas dari cengkeraman Belanda.

Konfrontasi Militer dan Diplomasi antara Indonesia dan Belanda

Perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan tidak berhenti saat proklamasi kemerdekaan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Pasca-proklamasi, negara baru ini harus menghadapi tantangan dari Belanda yang berupaya untuk kembali menguasai tanah jajahannya. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Belanda pada tahun 1949 merupakan forum bagi Indonesia untuk menegaskan tuntutan agar Belanda benar-benar menepati janjinya menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia tanpa syarat apapun. Dari konferensi tersebut, muncul tiga kesepakatan utama. Pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949. Kedua, APRIS ditetapkan sebagai satu-satunya badan militer RIS. Terakhir, status Irian Barat (kini dikenal sebagai Papua) akan dibahas lebih lanjut dalam waktu satu tahun ke depan (Suryanegara, 2016; Iryana, 2022).

Namun, ada kendala yang muncul terkait isu Irian Barat. Belanda gagal memenuhi janji mereka mengenai penyerahan wilayah tersebut (Marwati & Notosusanto, 1990). Walaupun ada perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat, tidak ada kesepakatan yang tercapai karena Belanda tampaknya terus mengelak dan mempersulit proses tersebut. Selama periode penundaan selama setahun, Belanda memanfaatkannya untuk memupuk sentimen anti-Indonesia melalui strategi dekolonisasi mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Irian Barat tetap berada di bawah kendali dan pengaruh Belanda. Beberapa alasan utama di balik keinginan Belanda untuk mempertahankan Irian Barat meliputi: 1) Irian Barat dianggap sebagai "Holland Tropis", tempat bagi orang-orang keturunan Eurasia yang tidak dapat atau memilih untuk tidak kembali ke Belanda, memberi mereka kesempatan untuk merasakan atmosfer seperti di tanah air mereka. 2) Wilayah tersebut dijadikan sebagai lokasi bagi pengusaha-pengusaha Belanda yang memutuskan untuk tidak tinggal di Indonesia setelah kemerdekaan. Dengan demikian, Irian Barat menjadi tempat perlindungan bagi kepentingan ekonomi Belanda di kawasan tersebut. 3) Irian Barat juga dilihat sebagai pos strategis bagi Belanda. Dengan mengendalikan wilayah tersebut, Belanda memiliki posisi strategis jika perlu melakukan intervensi, terutama jika terjadi ketidakstabilan atau kemunduran politik di Indonesia yang saat itu baru saja memulai perjalanan sebagai negara merdeka (Haris, 1999).

Sepanjang dekade 1950-an, Belanda menolak untuk meninggalkan Irian Barat, memandangnya sebagai simbol kebanggaan terakhir dari masa kejayaan kolonial mereka. Mulai tahun 1954, Belanda bahkan menutup semua akses perundingan mengenai sengketa Irian Barat dengan Indonesia (Adrian, 2014). Oleh karena itu, pentingnya Irian Barat bagi Belanda bukan hanya didasari oleh alasan geografis atau politik, tetapi juga alasan ekonomi dan strategis. Dalam konteks ini, upaya Belanda untuk mempertahankan kontrol atas Irian Barat dapat dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka di kawasan tersebut.

Dengan berbagai kepentingan yang mendasarinya, Belanda sangat aktif dalam upaya dekolonisasi Irian Barat. Sebagai bagian dari strategi untuk mencegah Irian Barat bergabung dengan Indonesia, Belanda bahkan menawarkan opsi kemerdekaan penuh untuk wilayah tersebut. Dalam upaya menunjukkan komitmennya, Belanda memulai berbagai inisiatif pembangunan di wilayah tersebut, seperti pendirian sekolah, mengizinkan pendirian partai-partai politik, serta memberikan tambahan subsidi. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk memenangkan hati rakyat Irian Barat dan mendapatkan dukungan dari komunitas internasional dengan menunjukkan kesiapan wilayah tersebut untuk menjadi negara berdaulat (Kusuma et al., 2019). Selama periode tersebut, Belanda mengambil alih kontrol administratif Irian Barat. Inisiatif pembangunan, khususnya di sektor politik, meningkatkan rasa nasionalisme dan kesadaran

politik masyarakat lokal. Keberadaan beberapa partai politik juga memicu semangat perjuangan kemerdekaan di antara masyarakat Irian Barat (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 1977).

Mulai tahun 1959, agenda pembebasan Irian Barat senantiasa menjadi fokus utama dalam setiap program kabinet Indonesia. Sejak periode tersebut, pendekatan Indonesia terhadap isu Irian Barat berubah menjadi lebih agresif dan konfrontatif. Sebagai bagian dari strategi konfrontasi tersebut, pemerintah memulai nasionalisasi atas berbagai perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Meskipun upaya nasionalisasi telah dimulai sejak dekade 1950-an, namun selama periode Demokrasi Terpimpin, tindakan tersebut diintensifkan dengan jangkauan yang lebih luas. Di arena politik, salah satu bentuk konfrontasi yang paling signifikan adalah pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Mengikuti dinamika yang berlangsung, pemerintah Indonesia kemudian memilih untuk meningkatkan intensitas konfrontasi dengan Belanda di berbagai sektor dan aspek hubungan kedua negara.

Pada 1960, tuntutan kedaulatan oleh rakyat Irian Barat semakin kuat, yang memaksa Belanda untuk membentuk "Dewan Nieuw Guinea", sebuah lembaga legislatif yang bertujuan mempromosikan demokrasi. Tak lama setelahnya, pada 19 Oktober 1961, sebuah komite nasional dibentuk untuk merencanakan kemerdekaan Papua. Komite ini kemudian merilis berbagai simbol kebangsaan, termasuk nama negara, lagu kebangsaan, lambang, bendera, dan motto. Namun, langkah Belanda dalam menumbuhkan sentimen anti-Indonesia dianggap cukup berhasil. Buktinya, demonstrasi besar berlangsung pada 1 Desember 1962 menentang Indonesia. Kekhawatiran komunitas internasional, terutama dari Amerika Serikat, muncul karena potensi Indonesia jatuh ke dalam pengaruh komunisme. Akhirnya, peran AS berubah dari sekadar pihak yang netral menjadi mediator aktif. Australia pun menyesuaikan posisinya, memutuskan hubungan dengan Belanda pada tahun 1961.

Walaupun perjuangan untuk mengintegrasikan Irian Barat ditempuh melalui jalur diplomatik, namun demi keefektifan pelaksanaannya didukung oleh infiltrasi militer dan ancaman perang terbuka (Sidel, 2001). Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Desember 1961 mengambil tindakan dengan jalan membentuk suatu Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) yang bertugas mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam Pembebasan Irian Barat. Pada sidang Depertan pada tanggal 14 Desember 1961 ditetapkan pembentukan suatu Komando Tertinggi (Koti) Pembebasan Irian Barat. Koti terdiri atas Panglima Besar Koti ialah Presiden dan dibantu oleh Ahmad Yani yang terpilih sebagai Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2013).

Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, tepatnya di alun-alun utara kota tersebut, Presiden Indonesia, Sukarno, mengeluarkan suatu pernyataan penting yang dikenal dengan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Melalui pidato bersejarah tersebut, Presiden Sukarno memberikan tiga perintah khusus: 1) menggagalkan upaya Belanda dalam mendirikan Negara Boneka Papua, 2) menegaskan kedaulatan Indonesia dengan mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, 3) mempersiapkan rakyat Indonesia untuk mobilisasi umum dalam rangka pembebasan Irian Barat (Kansil, 1977; Yulianto, 1998).

Setelah Presiden Indonesia mengeluarkan Komando Trikora, inisiatif untuk menghadapi Belanda dalam usaha pembebasan Irian Barat menjadi semakin intensif. Inisiatif Trikora ini dilihat bukan hanya sebagai simbol retorika, tetapi juga sebagai langkah konkrit pemerintah dalam menentang dominasi Belanda di Irian Barat. Sebagai respons atas pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia segera membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, sebuah entitas militer khusus yang bertugas untuk mengeksekusi strategi pembebasan Irian Barat dengan Mayjend Suharto sebagai pemimpin utamanya. Komando ini tidak hanya menjadi deklarasi semangat, tetapi juga pendorong bagi tindakan militer yang lebih konkret. Dengan sumber daya dan perencanaan yang matang, berbagai persiapan dilakukan secara serius. Salah satu langkah awal adalah melatih pasukan dengan skenario yang sesuai dengan kondisi geografis dan tantangan yang mungkin dihadapi di Irian Barat. Selain itu, penyiapan pangkalan

tempur juga dilakukan guna mendukung operasi militer di wilayah tersebut. Namun, sebelum melancarkan aksi militer skala besar, langkah-langkah awal yang lebih hati-hati diambil. Pasukan penyidik dikirim untuk memetakan situasi, mengumpulkan informasi intelijen, dan menganalisis potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Selanjutnya, satuan infiltrasi dikerahkan untuk memasuki Irian Barat secara diam-diam, dengan harapan dapat membangun momentum dan posisi strategis sebelum operasi militer utama diluncurkan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun memiliki tekad kuat untuk mengintegrasikan Irian Barat, pendekatan yang diambil Indonesia tetap dipikirkan dengan matang dan strategis (Kelompok Kerja Staf Angkatan Bersenjata, 1964).

Sikap tegas Indonesia dalam isu ini mendapatkan respons positif dan dukungan luas dari berbagai wilayah di tanah air. Untuk memanfaatkan semangat nasionalisme yang membara, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan yang memudahkan warga negara untuk bergabung sebagai sukarelawan dalam misi pembebasan Irian Barat. Langkah ini sejalan dengan esensi poin ketiga dari Trikora, yaitu mobilisasi umum. Sebagai hasilnya, pasukan sukarelawan yang berkomitmen untuk membebaskan Irian Barat mulai terbentuk di berbagai daerah di Indonesia.

Tindakan Indonesia dalam menggerakkan angkatan perangnya untuk pembebasan Irian Barat bukanlah hanya taktik perang semata, tetapi juga strategi diplomasi. Di tengah era Perang Dingin, dimana dunia terpecah antara dua blok kekuatan besar, opini publik internasional memegang peran penting. Dalam konteks ini, Indonesia berhasil menarik perhatian dunia, khususnya di forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan memanfaatkan dinamika Perang Dingin, Indonesia mendapat kesempatan untuk mempengaruhi pandangan internasional mengenai hak kedaulatannya atas Irian Barat. Pengadaan persenjataan dari Uni Sovyet oleh Indonesia menjadi bukti nyata dari seriusnya upaya Indonesia dalam merebut Irian Barat. Hal ini menciptakan ketegangan geopolitik, karena Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Belanda, menjadi prihatin. Tekad Presiden Sukarno yang tidak goyah dan terus menerus menegaskan ketegasannya atas Irian Barat, bahkan dengan potensi menggunakan kekerasan, menambah kecemasan pihak-pihak tersebut.

Dalam upaya konkret untuk merealisasikan klaimnya, Indonesia melancarkan Operasi STC-9, operasi infiltrasi khusus yang didukung oleh seluruh cabang Angkatan Perang Republik Indonesia. Operasi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam usaha pembebasan Irian Barat. Namun, dalam prosesnya, terjadi peristiwa tragis, yaitu "Pertempuran Laut Aru". Dalam pertempuran ini, Indonesia mengalami kerugian signifikan dengan tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya seorang tokoh penting, Komodor Yos Sudarso (Webster, 1962). Peristiwa ini sekaligus menandai seriusnya tekad Indonesia dan juga kompleksitas geopolitik era itu. Kombinasi taktik militer dan diplomasi yang diterapkan oleh Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat menjadi cermin betapa pentingnya wilayah tersebut bagi kedaulatan dan integritas negara.

Keputusan ini menarik perhatian Amerika Serikat, yang khawatir akan dampaknya yang bisa melibatkan dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet, dalam suatu bentrokan militer di kawasan Pasifik. Sebagai respons, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk segera melakukan dialog dan mencari solusi damai dengan Indonesia. Alhasil, pada tanggal 15 Agustus 1962, kedua negara, Indonesia dan Belanda, menandatangani Perjanjian New York, yang menjadi landasan kesepakatan bagi penyelesaian konflik mereka terkait Irian Barat. Melalui Perjanjian New York tahun 1962 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Indonesia, AS, Belanda, dan PBB, konflik Papua akhirnya mendekati solusi. Namun, keputusan yang diambil dalam perjanjian tersebut menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian masyarakat Papua, yang kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai bentuk protes. Perjanjian New York menetapkan bahwa wilayah Papua akan dikelola oleh Indonesia dengan penyelenggaraan PEPERA untuk menentukan status akhir wilayah tersebut.

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969

Pada tahun-tahun menjelang 1969, agenda internasional dan regional telah menempatkan mata dunia pada wilayah Irian Barat. Setelah serangkaian konfrontasi dan negosiasi dengan Belanda, akhirnya diputuskan bahwa suatu mekanisme harus diterapkan untuk menentukan nasib penduduk Irian Barat: apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau tetap di bawah administrasi Belanda. Mekanisme ini dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat, atau PEPERA.

Sebagai langkah awal, dilakukan serangkaian persiapan intensif. PBB, melalui operasinya, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) terlibat langsung dalam pengawasan transisi administrasi dari Belanda ke Indonesia. Pada bulan Oktober 1962, pemerintah Belanda resmi menyerahkan administrasi Irian Barat kepada UNTEA, yang kemudian mengalihkannya ke Indonesia pada Mei 1963. Mulai saat itu, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan PEPERA. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan dan pengawasan dari PBB, melakukan serangkaian persiapan. Di antaranya adalah pemetaan demografis untuk memahami distribusi populasi, pendidikan politik untuk menginformasikan masyarakat tentang apa itu PEPERA dan apa konsekuensinya, serta pelatihan bagi petugas yang akan bertugas dalam proses PEPERA.

Namun, proses persiapan PEPERA tidak tanpa kontroversi. Banyak kritikus yang menilai bahwa pendekatan yang digunakan terlalu terpusat dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi aspirasi masyarakat setempat. Ada juga kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin mempengaruhi hasil PEPERA melalui berbagai cara, termasuk intimidasi atau manipulasi informasi. Ketika 1969 tiba, saatnya PEPERA dilaksanakan. Sebanyak 1.025 wakil rakyat dipilih untuk mewakili penduduk Irian Barat dalam musyawarah. Proses ini, yang dikenal dengan "sistem musyawarah", bukanlah referendum dalam arti tradisional, tetapi lebih pada konsensus bersama. Hasil dari PEPERA menunjukkan dukungan yang kuat untuk integrasi dengan Indonesia.

Meski demikian, cara pelaksanaan PEPERA tetap menjadi sumber kontroversi. Banyak pihak yang berpendapat bahwa prosesnya tidak sepenuhnya demokratis dan mencerminkan keinginan sejati masyarakat Irian Barat. Namun, dengan pengakuan PBB atas hasil PEPERA, Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia, membuka babak baru dalam sejarah wilayah tersebut.

Tahun 1969 menjadi momen krusial bagi Irian Barat, saat Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) digelar untuk menentukan nasib wilayah tersebut dalam naungan NKRI. Namun, jauh dari ekspektasi sebagai proses yang transparan dan demokratis, PEPERA memunculkan serangkaian kontroversi yang masih diperdebatkan hingga kini. Pertama dan terutama, metode "musyawarah" yang diadopsi oleh Indonesia untuk PEPERA mendapat banyak sorotan. Daripada menggelar referendum terbuka di mana setiap warga Irian Barat diberi kesempatan untuk memberikan suaranya, pemerintah memilih 1.025 wakil untuk mewakili suara masyarakat. Banyak pihak berpendapat bahwa metode ini tidak mampu mencerminkan aspirasi sejati rakyat Irian Barat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa wakil-wakil tersebut mungkin dipilih atau ditekan untuk mendukung integrasi dengan Indonesia.

Kemudian, ada laporan dan kesaksian mengenai intimidasi dan tekanan yang diterima oleh masyarakat setempat, baik sebelum maupun selama proses PEPERA. Dikatakan bahwa ada kehadiran militer yang signifikan selama proses tersebut dan ini membuat banyak penduduk merasa terintimidasi untuk menyuarakan pendapat sejati mereka. Persoalan lainnya adalah kurangnya edukasi dan informasi kepada masyarakat Irian Barat mengenai apa yang sebenarnya mereka putuskan. Beberapa sumber menunjukkan bahwa banyak warga yang tidak sepenuhnya memahami implikasi dari keputusan PEPERA, terutama mengingat kurangnya akses informasi dan pendidikan politik yang memadai di wilayah tersebut.

Meski PBB pada akhirnya mengesahkan hasil dari PEPERA, respons internasional terhadap proses tersebut tidak seragam. Banyak pihak, terutama negara-negara serta organisasi

hak asasi manusia, merasa bahwa PEPERA tidak sesuai dengan standar internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri. Kendala lainnya muncul dari keterlibatan PBB yang hanya sebatas mengirim sekelompok pengamat dengan kewenangan yang terbatas, sehingga memunculkan keraguan mengenai keadilan proses tersebut. Meskipun demikian, PBB memutuskan untuk mengakui hasil PEPERA yang mendukung integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Dengan keputusan tersebut, secara resmi Irian Barat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, keputusan ini tidak menutup pintu perdebatan. Sampai saat ini, diskusi mengenai legitimasi dan integritas PEPERA masih sering muncul, dan menjadi fokus dalam diskusi tentang hak asasi manusia dan otonomi khusus di Papua.

Sejalan dengan itu, meski PBB telah memberikan pengakuan terhadap hasil PEPERA, isu Papua tetap hangat diperbincangkan di tingkat internasional. Terdapat kelompok-kelompok tertentu yang terus mendorong kemerdekaan Papua, sementara ada pula kritik yang menyoroti cara penyelenggaraan PEPERA. Akibat perdebatan ini, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan beberapa entitas internasional sesekali menjadi kurang harmonis, khususnya ketika isu Papua menjadi sorotan.

Kelompok yang mendukung ide kemerdekaan Papua dan pemisahan dari Republik Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka yang mendukung integrasi Papua ke dalam NKRI. Alasan utama ketidaksetujuan kelompok pro-pemisahan terhadap PEPERA adalah berdasarkan tuduhan bahwa terdapat intimidasi oleh pihak otoritas dan aparat militer Indonesia selama proses sosialisasi PEPERA. Mereka juga menegaskan bahwa PEPERA, yang diambil berdasarkan suara kelompok perwakilan masyarakat dan bukan dengan prinsip 'one man one vote', bukanlah representasi yang adil dari pendapat masyarakat Papua. Setelah PEPERA, muncul peningkatan dalam gerakan yang mendukung pemisahan Papua dari Indonesia. Terdapat ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok pro-integrasi dan pro-pemisahan. Sayangnya, sejak tanggal 1 Januari 1963, ketika pemerintahan Papua resmi berada di bawah kendali Pemerintah RI, banyak peristiwa kekerasan terjadi di tanah Papua. Kekerasan ini sebagian besar didasari oleh ketidaksepakatan politik antara masyarakat yang mendukung integrasi dan mereka yang mendukung pemisahan.

Sebuah lembaga non-pemerintah memperkirakan bahwa dalam periode 40 tahun sejak PEPERA hingga dekade 1990-an, sekitar 100.000 orang Papua menjadi korban peristiwa kekerasan. Penentangan yang kuat dari kelompok pro-pemisahan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan berbagai operasi militer dalam upaya menghentikan gerakan yang dianggap anti pemerintah. Beberapa contoh operasi militer tersebut antara lain Operasi Winumurti I dan II pada tahun 1962-1971, yang bertujuan untuk penggalangan dan pengamanan sebelum, selama, dan setelah PEPERA. Selanjutnya, antara tahun 1970-1985, terjadi Operasi Tumpas yang bertujuan untuk melumpuhkan basis OPM. Pada tahun 1977, terjadi sebuah operasi militer besar yang melibatkan penggunaan pesawat pembom, mengakibatkan kerusakan di 17 desa dan diperkirakan menyebabkan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak, lansia, dan perempuan di daerah pegunungan Jayawijaya. Selain operasi-operasi tersebut, masih banyak operasi militer lain yang dilakukan di tanah Papua.

Hasil penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan penanggulangan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di Irian Barat. Dengan menyajikan data yang kaya dan terperinci tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi wilayah tersebut, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perancangan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, temuan-temuan ini dapat membantu mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan dan berdaya guna untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjadi sumbangan ilmiah, tetapi juga alat praktis yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat Irian Barat dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara holistic

Melalui hasil penelitian ini, terbuka peluang untuk mendapatkan wawasan baru dan memperdalam pemahaman kita tentang dinamika sosial di Irian Barat. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menyajikan pandangan yang lebih mendalam terkait aspek-aspek kritis yang memengaruhi masyarakat setempat. Dengan memperluas cakupan pengetahuan kita tentang faktor-faktor ekonomi, budaya, dan sosial yang terlibat, penelitian ini tidak hanya mengisi celah pengetahuan, tetapi juga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap realitas kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Irian Barat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berpotensi untuk memberikan kontribusi praktis, tetapi juga mendorong pemikiran kritis dan diskusi yang lebih dalam dalam rangka mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Irian Barat, yang kini dikenal sebagai Papua, merupakan bagian dari mosaik keberagaman budaya dan sejarah Indonesia yang memiliki dinamika unik dalam konteks kolonisasi. Meski berbagai kekuatan Eropa berusaha menguasainya, Belanda yang akhirnya mendominasi wilayah ini hingga pertengahan abad ke-20 dengan pendirian pos-pos pemerintahan, pendekatan sosial-kultural melalui misionaris, dan pemberdayaan struktur pemerintahan adat lokal. Namun, perlawanan dan semangat kebangsaan masyarakat lokal, bersama dengan diplomasi Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan, berhasil mengakhiri dominasi Belanda, menyatukan Irian Barat kembali ke dalam pangkuan Nusantara, meski tantangan-tantangan baru masih menanti. Dalam retrospeksi, konfrontasi antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat merupakan salah satu contoh bagaimana aspirasi nasionalisme, geopolitik global, dan diplomasi internasional berperan dalam menentukan nasib sebuah wilayah. Meskipun ada banyak tantangan dan hambatan, tekad Indonesia untuk mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayahnya menunjukkan komitmen negara ini untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, B. (2014). *52 Tahun infiltrasi PGT di Irian Barat*. Gramedia.
- Dinas Sejarah Angkatan Darat. (1977). *Rumpun Diponegoro dan pengabdianya*. Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro.
- Dinas Sejarah Angkatan Darat. (2013). *Achmad Yani: Prajurit patriot sejati*. CV. Idhar Bandung.
- Haris, S. (1999). *Indonesia diambang perpecahan*. Erlangga.
- Iryana, W. (2022). *Sejarah pergerakan nasional: Melacak akar historis perjuangan bangsa Indonesia dan kiprah kaum santri dalam lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia*. Prenada Media.
- Kansil, C. S. (1977). *Sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia dalam rangka mata-pelajaran sejarah/kewarganegaraan untuk sekolah lanjutan atas dan ideologi/filsafat negara Pancasila untuk perguruan tinggi*.
- Kelompok Kerja Staf Angkatan Bersenjata. (1964). *Sejarah singkat perjuangan bersenjata bangsa Indonesia*.
- Kuntowidjyo, K. (2003). *Metodologi sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Kusuma, A. J., Setiawan, M. C. A., Ilmar, A., & Situmeang, N. (2019). Sejarah singkat perjuangan bersenjata bangsa Indonesia penyelesaian konflik internal antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatisme di Papua melalui mekanisme horse-trading. *Society*, 7(2).
- Marwati, D. P., & Notosusanto, N. (1990). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (1993). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (p. 90115). London: MacMillan.
- Sidel, J. T. (2001). Indonesia: the limits of democratization and decentralization, January 2000–October 2001. *Writenet Paper*, (04).
- Suryanegara, A. M. (2016). *Api Sejarah 1*. Surya Dinasti.
- Webster, D. (1962). *The struggle of West New Guinea, 1960-1962*. Universitas British Columbia.
- Yulianto, K. (1998). *Sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia*. Erlangga.